



## KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

Edy Zaputra\*, Universitas Andalas, Indonesia

Emeraldy Chatra, Universitas Andalas, Indonesia

Ernita Arif, Universitas Andalas, Indonesia

### ABSTRACT

Indonesia faces significant challenges concerning deforestation, with forest and land fires emerging as a prominent contributor to deteriorating air quality and subsequent health concerns, notably evident in Riau Province where these fires are recurrent. This study endeavors to scrutinize the Environmental and Forestry Service of Riau Province's environmental communication strategies aimed at preventing forest and land fires and to unravel the underlying motives guiding these communication efforts. Employing a qualitative methodology and a phenomenological approach to examine environmental communication as a mechanism for forest and land fire prevention, the study adopts an interpretive phenomenological data analysis approach. Findings from the research elucidate that DLHK Riau Province employs patrolling and awareness campaigns to communicate the legal prohibition of forest burning, supplemented by supervision and engagement with companies situated in fire-prone regions. Moreover, the provision of forest plant seeds seeks to counteract the expansion of oil palm plantations. The study highlights challenges faced by DLHK in conducting effective environmental communication due to budget constraints and geographical barriers to reaching remote communities. It further underscores the motivation behind environmental communication, rooted in operational and technical guidelines, particularly pertinent in Riau Province, where extensive peatlands necessitate specialized management and intervention.

### ARTICLE HISTORY

Received 28/03/2023  
Revised 04/04/2023  
Accepted 11/04/2023  
Published 21/08/2023

### KEYWORDS

Environmental communication; phenomenology; forest and land fires; mitigation.

### CITATION (APA 6<sup>th</sup> Edition)

Zaputra, E., Chatra, E., & Arif, E. (2023). Komunikasi Lingkungan dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 324-330.

### \*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ [edyzaputra@gmail.com](mailto:edyzaputra@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.6926>

## PENDAHULUAN

Komunikasi memiliki peran tak terelakkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bagaimana manusia memahami dan merespons hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup yang sangat beragam (Bungin, 2006; Kadarisman, 2019). Lingkungan, yang terdiri dari unsur abiotik dan biotik, memiliki aspek abiotik meliputi tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, dan bunyi, serta aspek biotik yang mencakup tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme (Littlejohn & Foss, 2012; Kadarisman, 2019). Ilmu yang mempelajari hubungan lingkungan adalah ekologi atau ilmu lingkungan, yang merupakan cabang dari biologi (Kadarisman, 2019).

Menurut Chisholm, Indonesia menghadapi masalah serius dalam hal lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan pencemaran udara bahkan hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Salah satu kebiasaan yang berkelanjutan di masyarakat Indonesia adalah membuka lahan dengan cara membakar, yang telah berlangsung bertahun-tahun (Rachmatullah & Ha, 2019). Dampaknya yang nyata, terutama dari karhutla, bukan hanya berdampak pada penurunan oksigen dari hutan yang terbakar, tetapi juga menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia, mencapai sekitar 680.000 hektar per tahun (Flor & Cangara, 2018).

Masalah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sudah berlangsung sejak tahun 1997, di mana eksploitasi lingkungan telah berlangsung selama hampir 22 tahun. Dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan sangat merugikan, termasuk asap yang membahayakan kesehatan pernapasan manusia. Meskipun terdapat beberapa tahun ketika Provinsi Riau terbebas dari kebakaran hutan dan lahan seperti pada tahun 2007, 2008, 2016, 2017, dan



2018, namun tahun-tahun tertentu seperti 2014 dan 2015 menjadi tahun-tahun puncak, bahkan mencapai status bencana nasional dan tanggap darurat kabut asap (Yusuf et al., 2019).

Perubahan fungsi hutan yang mengakibatkan karhutla, terutama terkait lahan gambut, belum sepenuhnya dapat diatasi oleh pemerintah, terlihat dari masih berlanjutnya pembakaran hutan. Faktor risiko yang tinggi terhadap kebakaran termasuk konversi hutan menjadi tanaman komoditas seperti karet dan kelapa sawit, serta eksploitasi hutan alam yang mengubah struktur tumbuh-tumbuhan dan meningkatkan potensi penyebaran api. Data menunjukkan bahwa hutan sekunder yang telah terganggu oleh pembalakan memiliki risiko lebih tinggi terbakar. Dampak dari kebakaran tidak hanya terbatas pada asap, tetapi juga merusak ekosistem hutan, mempengaruhi hewan liar dan tumbuhan, serta memicu kelangkaan spesies. Implikasinya yang kompleks jika pembakaran hutan terus berlanjut setiap tahun (Yuferdiansyah, 2021; Dopler et al, 2022).

Sukma Yeni Budiarti, Staf Analisis Lingkungan Hidup, menggarisbawahi pentingnya tindakan pencegahan karhutla yang dilakukan di Provinsi Riau pada tahun 2019. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak mereka berperan serta dalam pencegahan dan memadamkan api menjadi langkah utama (Wawancara, 13 Maret 2020). Observasi awal terhadap komunikasi lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengungkapkan upaya mereka dalam mendorong masyarakat peduli api serta memberikan informasi mengenai pencegahan dan pemadaman api saat terjadi kebakaran hutan. Sosialisasi ini dilakukan di berbagai tempat di provinsi tersebut selama setahun pada tahun 2019.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berperan penting dalam pengendalian dan pencegahan masalah lingkungan, terutama karhutla. Fokusnya meliputi pengendalian perubahan iklim dan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Melalui komunikasi lingkungan, pemerintah berupaya melakukan langkah pencegahan sebelum kebakaran hutan terjadi setiap tahun. Pentingnya perubahan pola pikir masyarakat terhadap lingkungan diilustrasikan melalui komunikasi yang efektif dan konseptual. Kerjasama antara berbagai pihak, termasuk masyarakat dan kelompok-kelompok di dalamnya, menjadi kunci untuk mengurangi praktik membakar hutan dan lahan serta mendorong inovasi dalam penggarapan lahan yang lebih berkelanjutan.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, dalam lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memberikan data mengejutkan tentang kualitas udara di Provinsi Riau pada September 2019. Beberapa daerah, seperti Rumbai Kota Pekanbaru, Minas Kabupaten Siak, Kota Dumai, dan Kabupaten Rokan Hilir Libo, menghadapi kualitas udara berwarna gelap/hitam yang sangat berbahaya. Kabupaten Bengkalis Kota Duri dan Kota Pekanbaru memiliki kualitas udara berwarna kuning yang juga tidak sehat. Di sisi lain, sebagian provinsi lain di Pulau Sumatra menunjukkan kualitas udara baik, kecuali Provinsi Riau yang memiliki kualitas udara sangat berbahaya berwarna hitam/gelap.

Banyak daerah di Provinsi Riau mengalami indeks kualitas udara yang mencemaskan. Asap dari kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi pada musim kemarau menjadi penyebab utama, dengan campur tangan manusia dalam pembukaan lahan sebagai faktor kunci. Pemerintah telah berusaha mengatasi masalah ini, tetapi permasalahan lingkungan masih berlarut-larut. Muncul pertanyaan kritis mengenai efektivitas upaya pemerintah dan pelaku terkait dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Suara yang mempertanyakan apakah Riau "terbakar" atau "dibakar" semakin mengemuka. Masyarakat Riau, khususnya mahasiswa, berupaya mendorong pemerintah untuk menangani akar permasalahan ini melalui perwakilan daerah dan Gubernur.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia, terutama di wilayah-wilayah seperti Provinsi Riau yang memiliki kondisi ekologi yang rentan terhadap kebakaran. Fenomena ini terjadi secara periodik pada musim kemarau dan memiliki dampak negatif yang luas, termasuk kerusakan lingkungan, hilangnya habitat, serta dampak kesehatan masyarakat akibat kabut asap. Berbagai upaya mitigasi telah dilakukan untuk mencegah

kebakaran ini, dengan pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan strategi komunikasi yang efektif.

Studi yang dilakukan oleh Sitorus dan Hidayat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menyoroti strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat setempat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkapkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA). Kolaborasi dengan PT. Pertamina RU II juga dilakukan untuk menciptakan inovasi sumur *hydrant*, pembangunan embung air, serta penggunaan lahan kosong untuk pertanian nanas dan Arboretum Gambut. Hasil ini mengindikasikan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dan sinergi antar-sektor dalam mitigasi risiko kebakaran, sambil memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (Sitorus & Hidayat, [2020](#)).

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan tetap ada. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi komunikasi bencana. Rohayati dan Alhidayatillah dalam penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau telah melakukan komunikasi bencana secara optimal, masih terdapat faktor-faktor lain seperti kesalahan manusia dan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk terus memperbaiki dan memperkuat aspek komunikasi dalam upaya mengurangi kabut asap yang berulang setiap tahun (Rohayati & Alhidayatillah, [2020](#)).

Selain itu, penting juga untuk memahami bagaimana perilaku komunikasi masyarakat dapat berdampak pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sukartik dan Nurdin mengungkapkan bahwa perilaku masyarakat dalam hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti penggunaan media massa, pemahaman pesan keislaman tentang lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa pesan-pesan keislaman memiliki pengaruh kuat terhadap tindakan pencegahan karhutla, dan pemberdayaan masyarakat juga berpotensi meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam upaya pencegahan (Sukartik & Nurdin, [2017](#)).

Pentingnya komunikasi lingkungan juga menjadi sorotan dalam mengembangkan kelestarian hutan. Herutomo dan Istiyanto menjelaskan bahwa kelestarian hutan dapat terjaga melalui partisipasi masyarakat yang didasarkan pada komunikasi lingkungan. Melalui konsep hutan sosial, masyarakat dapat memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap hutan dan ikut serta dalam menjaga fungsi ekologi dan ekonomi hutan. Pentingnya komunikasi lingkungan dalam hal ini tercermin dalam pendekatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat, yang memiliki dampak positif terhadap upaya menjaga kelestarian hutan (Herutomo & Istiyanto, [2017](#)).

Meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan, tantangan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan masih tetap ada. Saqinah dan Nasution (2019) meneliti strategi komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam mencegah kebakaran. Meskipun strategi komunikasi telah dirancang dengan baik, kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi. Studi ini menunjukkan bahwa pemilihan komunikator, penentuan audiens, jenis pesan, dan media komunikasi yang digunakan juga berperan dalam keberhasilan upaya pencegahan (Saqinah & Nasution, [2019](#)).

Dalam menghadapi permasalahan kompleks seperti pencegahan kebakaran hutan dan lahan, strategi yang melibatkan partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan kelestarian lingkungan (Karmila, [2022](#)). Dengan memahami pengalaman dari penelitian-penelitian sebelumnya, kita dapat memperkuat pendekatan dan strategi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah yang rentan seperti Provinsi Riau.

Penelitian ini berfokus pada komunikasi lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam rangka pencegahan karhutla. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman komunikasi dalam upaya pencegahan tersebut.

Walaupun telah ada tindakan pencegahan, pembakaran hutan dan lahan masih terus terjadi, merugikan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa komunikasi lingkungan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan memiliki tujuan untuk menyampaikan kebijakan, peraturan, dan larangan yang berkaitan dengan pelestarian hutan serta konsekuensi kerusakan dan dampak yang dihasilkan. Komunikasi ini harus sesuai agar tujuan kebijakan dapat tercapai dan berkontribusi pada perubahan perilaku dan sikap masyarakat terhadap lingkungan. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami lebih dalam interaksi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan pemangku kepentingan serta masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla. Penelitian ini mengangkat isu lingkungan dari perspektif komunikasi, di mana komunikasi dianggap sebagai sarana penting dalam menyampaikan informasi mengenai isu lingkungan dan tindakan pencegahan. Dalam kerangka fenomenologi, kebenaran ditemukan melalui pengalaman langsung (Fiske, 2014). Dalam kajian ini, kami berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana komunikasi lingkungan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dikaji melalui pendekatan fenomenologi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau?

## METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir (Sugiyono, 2014; Willig & Rogers, 2017). Menurut Creswell peneliti kualitatif lebih memperhatikan proses daripada hasil dan juga menganggap kualitatif sebagai alat utama dalam mengumpulkan data dan analisis data serta peneliti harus terjun kelapangan melakukan observasi (Bungin, 2006). Penelitian kualitatif mengumpulkan data di lapangan di mana para partisipan mengalami masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut. Peneliti kualitatif mengumpulkan informasi berbicara secara langsung dengan masyarakat dan menyaksikan mereka berperilaku dan bertindak dalam lingkungan mereka. Dalam lingkungan alamiah ini, para peneliti melakukan interaksi secara langsung sepanjang waktu (Creswell, 2016). Dalam penelitian ini fenomena komunikasi lingkungan pencegahan karhutla peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, yang mana fenomenologi selalu difokuskan pada menggali, memahami, menafsirkan arti fenomena, peristiwa, dan hubungan dengan orang-orang dalam situasi tertentu (Yusuf, 2014; Nurdin, 2016; Hamzah, 2020). Penelitian ini menggunakan fenomenologi sebagai pendekatan penelitian dan menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz (Schutz, 1970) untuk mendalami motif sebagaimana dengan tujuan penelitian dan menggunakan teori DPR (Dialog Publik Relations) untuk pembahasan ilmu komunikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mendapatkan hasil penelitian dari menganalisis pengalaman komunikasi lingkungan secara fenomenologi Schutz dengan melakukan tipifikasi data, memilah data berdasarkan kategori-kategori yang peneliti dapatkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu menganalisis pengalaman komunikasi lingkungan. Kemudian menyaring data menggunakan *Interpretative Phenomenological Analysis* sehingga memunculkan tema-tema hasil olahan transkrip dari subjek penelitian kemudian baru mendapatkan tema pokok.

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan surat peraturan daerah (perda) yang sudah berlaku dan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Riau. Sehingga DLHK dalam melaksanakan tugas pencegahan hanya sesuai dengan peraturan serta anggaran yang telah disediakan, yang mana anggaran memiliki keterbatasan sesuai dengan hasil rapat APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Riau. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena bentuk tanah untuk Provinsi Riau di atas rata-rata berjenis gambut yang sangat sering terjadi kebakaran sehingga memiliki

penanganan yang khusus untuk menekan tingkat kebakaran dengan cara menghimbau dan mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan tanah gambut.

Dalam melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan DLHK melakukan dalam dua cara pertama sosialisasi, kegiatan ini memiliki ragam dan bentuk mulai dari jumlah kegiatan yang dilakukan terbatas karena anggaran. Untuk kegiatan kedua yaitu patroli yang mana kegiatan ini sebagai upaya peninjauan ke daerah-daerah yang memiliki tingkat rawan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebagai upaya pencegahan DLHK menyurati Kantor camat kemudian camat mengundang seluruh desa yang terdekat untuk menghadiri undangan yang diberikan DLHK. Camat mempersiapkan segala kebutuhan baik lokasi kegiatan sosialisasi, peserta sosialisasi. Setelah itu DLHK memberikan undangan kepada instansi terkait TNI dan Polri serta pejabat daerah sebagai pemateri tambahan. Dalam hal sosialisasi yang bertindak sebagai komunikator bukan hanya DLHK melainkan instansi-instansi yang terkait yang diberikan undangan hal ini juga bergantung dengan anggaran yang tersedia. Untuk durasi kegiatan sosialisasi biasanya satu hari dari jam 09:00 sampai 16:00 WIB, DLHK sebagai pemateri hanya berdurasi 40 sampai 60 menit. Jumlah sosialisasi yang dilakukan DLHK pada tahun 2021 sekitar 5 kali di 5 kabupaten daerah yang berbeda dan 1 sampai 2 kali per tiap-tiap UPT KPH. Untuk komunikasi atau masyarakat desa rata-rata berjumlah 20 orang lebih setiap kegiatan.

Kegiatan kedua yang dilakukan DLHK terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan mengunjungi desa-desa yang memiliki daerah rawan titik api untuk dilakukan pendataan dan ditinjau menghimbau secara langsung dan menjumpai masyarakat yang berada di sekitar daerah rawan tersebut untuk menjaga lahannya dan melakukan tindak pemadaman apabila terjadi kebakaran. Patroli ini biasanya dilakukan dalam musim kemarau dan jumlah tim yang dibentuk paling 2 sampai 3 orang untuk mengunjungi daerah rawan tersebut.

Peneliti menemukan hampir seluruh daerah rawan kebakaran itu memiliki dasar tanah yang gambut, yang mana untuk mengelola tanah ini memiliki perlakuan khusus, berbeda dengan tanah yang bersifat mineral, seperti tanah pada umumnya. Tanah gambut jika dilihat dari kasat mata seperti serpihan kayu yang berukuran kecil dan memiliki kedalaman yang bervariasi serta memiliki kadar air yang banyak ketika dalam keadaan basah. Permasalahan pada umumnya ketika pada musim kemarau tanah gambut akan memiliki kandungan gas dan sangat mudah untuk terbakar dan sangat sulit untuk dipadamkan. Lahan di daerah rawan ini yang dilakukan tindak pencegahan kebakaran oleh DLHK karena akan sangat berpotensi terjadinya kebakaran.

Dalam pengelolaan tanah gambut sendiri pemerintah berupaya untuk mengubah tren masyarakat yang pada umumnya untuk ikut-ikutan menanam kelapa sawit yang mana selama ini kita mengetahui bahwa kelapa sawit bukan tanaman produktif tutupan lahan atau lebih singkatnya bukan tanaman hutan. Hal ini di beberapa daerah belum memiliki titik terangnya keinginan dari pemerintah dan keinginan dari masyarakat yang menginginkan tanaman produktif yang memiliki hasil. Dalam beberapa wilayah tertentu seperti daerah Siak, Pelalawan, dan Meranti terdapat beberapa perusahaan yang mengelola hutan untuk diproduksi. Perusahaan-perusahaan tersebut diawasi oleh DLHK selaku pemerintah sebagai salah satu bentuk tindak pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara berkala terkait dengan tindak pencegahan dan juga tindak penanggulangan kebakaran untuk di lokasi sekitar perusahaan. DLHK menghimbau dan membangun komunikasi dengan perusahaan terkait, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan kesiapan dan persiapan alat yang dimiliki apabila seandainya terjadi kebakaran hutan, karena untuk perusahaan yang radius jarak 5 km sampai 6 km merupakan wilayah tanggung jawab perusahaan apabila terjadi kebakaran.

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh DLHK masyarakat mengharapkan adanya bantuan kepada mereka yang mana hal tersebut dapat membantu mereka secara ekonomi karena rata-rata

masyarakat yang berada di daerah rawan gambut hanya bekerja sebagai petani dan berkebun saja. Adanya insentif sebagai pengganti waktu yang mereka berikan untuk mengikuti kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Keinginan masyarakat seperti ini sudah diadakan oleh DLHK meskipun dengan jumlah hanya sedikit karena untuk pemberian bantuan anggaran yang memang terbatas. DLHK menghimbau dan membangun komunikasi dengan perusahaan terkait, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan kesiapan dan persiapan alat yang dimiliki apabila seandainya terjadi kebakaran hutan, karena untuk perusahaan yang radius jarak 5 km sampai 6 km merupakan wilayah tanggung jawab perusahaan apabila terjadi kebakaran.

Berdasarkan pengalaman komunikasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pencegahan kebakaran hutan lahan peneliti mendapatkan sebuah bentuk pola tahapan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam melakukan komunikasi lingkungan sebagai upaya tindak pencegahan.

Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan sangat beragam, mulai dari jenis tanah gambut yang apabila dalam musim kemarau menjadi kering akan sangat mudah terbakar. Kemudian membuka lahan dengan cara dibakar, karena memang dengan dibakar merupakan salah satu cara dan strategi yang mudah dan tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Kemudian adanya konflik lahan yang terjadi di masyarakat itu sendiri, konflik yang di maksud belum adanya daerah perbatasan desa yang masih definitif yang mana salah satu pihak akan mengklaim bahwa wilayah atau daerah lahan kepunyaan desanya. Lahan-lahan seperti yang sering terjadi kebakaran. Ada juga beberapa lahan yang terbakar namun ketika dicari siapa pemiliknya itu banyak yang tidak diketahui, setelah terbakar biasanya akan ada yang menanam di lahan tersebut. Terakhir yang paling sulit itu mengenai tren menanam kelapa sawit, yang mana masyarakat memiliki tanah yang luas menanam kelapa sawit karena sawit merupakan 100% tanaman produktif namun tidak bagus untuk tutupan lahan hutan sehingga mempengaruhi cuaca menjadi panas apabila dalam lahan tersebut dibuka dalam jumlah yang sangat besar seperti yang terjadi sekarang saat ini.

## SIMPULAN

Pengalaman komunikasi lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pencegahan kebakaran hutan lahan terdapat dua cara yang pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah rawan kebakaran. daerah rawan ditentukan oleh jenis tanah yang ada di suatu daerah tersebut kemudian adanya titik *hotspot* (panas) di daerah tersebut. Cara yang kedua melakukan patroli ke desa-desa yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria meninjau secara langsung di lokasi terjadinya titik api atau *hotspot*. melarang masyarakat untuk membuka lahan dengan dibakar, memberikan pengetahuan terkait pengelolaan tanah gambut, dampak dan bahaya kebakaran, memberitahu masyarakat terkait peraturan-peraturan dalam mengelola hutan dan lahan. DLHK bukan hanya melarang untuk di beberapa tempat diberikan bantuan bibit tanaman hutan untuk pengelolaan lahan gambut. DLHK Provinsi Riau memiliki kendala dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dari segi keterbatasan anggaran dalam melakukan kegiatan pencegahan, ragam pendidikan masyarakat menjadikan kesulitan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan informasi, adanya migrasi masyarakat yang sudah mengikuti kegiatan pencegahan menjadikan pesan yang disampaikan tidak tepat sasaran, profesi masyarakat yang bekerja harian sebagai petani atau berkebun untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan pencegahan, kemudian jarak tempuh untuk daerah kepulauan dalam menjangkau kegiatan pencegahan kebakaran, terakhir menginginkan penegakan hukum yang jelas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Motif pencegahan yang dilandasi oleh Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang sudah ditetapkan dan dianggarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau serta memiliki tanah berjenis gambut yang cukup luas sehingga dibutuhkan penanganan khusus dalam pengelolaan tanah gambut untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

## REFERENSI

- Bungin, B. (2006). *Sosiologi komunikasi: Teori, paradigma, dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J.W. (2016). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dopler, D., Juita, E., & Ulmi, A. Z. P. (2022). Analisis Spasial Kebakaran Hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 772-796. <https://doi.org/10.58344/jmi.vi13.71>.
- Fiske, J. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi. Edisi ke-3*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Flor, A. G. & Cangara, H. (2018). *Komunikasi Lingkungan: Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan melalui Strategi Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Herutomo, C., & Istiyanto, S. B. (2021). Komunikasi Lingkungan dalam Mengembangkan Kelestarian Hutan. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 20(1), 1-13. <https://doi.org/10.32509/wacana.v20i1.1165>.
- Kadarisman, A. (2019). *Komunikasi Lingkungan: Pendekatan Sustainable Development Goals SDGs dan Corporate Sosial Responsibility CSR*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Karmila, L. (2022). Manajemen Komunikasi Bencana dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Sumatera Selatan. *AT-TANZIR: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 13(2), 121-136. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v13i2.1220>.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A.. (2012). *Teori Komunikasi Theories of Human Communication*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nurdin. (2016). *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rachmatullah, A., & Ha, M. (2019). Examining high-school students' overconfidence bias in biology exam: a focus on the effects of country and gender. *International Journal of Science Education*, 41(5), 652-673. <https://doi.org/10.1080/09500693.2019.1578002>.
- Rohayati, R., & Alhidayatillah, N. (2020). Optimalisasi Komunikasi Bencana dalam Mengurangi Kabut Asap di Provinsi Riau. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i1.2865>.
- Saqinah, N. W., & Nasution, B. (2019). Strategi komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 1-12. <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/24846>.
- Schutz, A. (1970). *Alfred Schutz on phenomenology and social relations*. (Vol. 360). Chicago: University of Chicago Press.
- Sitorus, S. H., & Hidayat, R. (2020, November). Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. In *International Conference Communication and Sosial Sciences (ICCOMSOS)*, 1(1). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ICCOMSOS/article/view/8283>.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sukartik, D., & Nurdin, N. (2017). Perilaku Komunikasi Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Desa Bebas Api (Fire Free Village) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Jurnal Dakwah Risalah*, 28(2), 115-124. <http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v28i2.6224>.
- Willig, C., & Rogers, W. (2017). *The SAGE Handbook of qualitative research in psychology*. (Vols. 1-0). SAGE Publications Ltd, <https://doi.org/10.4135/9781526405555>.
- Yuferdiansyah, H. (2021). Analisis Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap Perubahan Tutupan Lahan di Kecamatan Kerumutan. *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau.
- Yusuf, A., Hapsoh, H., Siregar, S. H., & Nurrochmat, D. R. (2019). Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6(2), 67-84. <http://dx.doi.org/10.31258/dli.6.2.p.67-84>.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.